

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penciptaan karya

Laut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia, sebagai negara kepulauan menjadikan laut sebagai jantung dari perdagangan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya. Wilayah laut Indonesia yang luas menjadikan sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Garis pantai Indonesia yang membentang sepanjang 99.093 km membuat sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut yang dimana kondisi ini memperlihatkan bahwa laut tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial, ekonomi dan budaya bangsa Indonesia (Yistiarani, 2020).

Ketergantungan terhadap ruang laut tersebut tercermin secara nyata di wilayah pesisir selatan Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 telah memosisikan wilayah pesisir sebagai "Halaman Depan" pembangunan, dengan sektor kelautan sebagai pilar ekonomi utamanya (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2024). Ambisi ini didorong oleh potensi sumber daya laut yang melimpah, di mana target produksi perikanan tangkap terus dioptimalkan guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan memenuhi kebutuhan hidup ribuan nelayan yang beroperasi di sepanjang garis pantainya (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, 2024).

Kehidupan masyarakat pesisir di Kabupaten Gunungkidul sangat bergantung pada dinamika Laut Selatan, di mana tercatat sebanyak 2.276 nelayan menggantungkan mata pencahariannya pada aktivitas penangkapan ikan (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, 2024). Bagi nelayan, laut tidak hanya dipahami sebagai bentang alam, melainkan sebagai sumber penghidupan utama yang menopang keberlangsungan ekonomi

keluarga. Ketergantungan terhadap hasil laut menjadikan profesi nelayan memiliki posisi sentral dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat pesisir, meskipun mereka harus berhadapan dengan ketidakpastian hasil tangkapan serta risiko kerja yang tinggi akibat kondisi alam. Situasi ini menunjukkan bahwa kehidupan sosial dan ekonomi nelayan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan laut yang mereka hadapi setiap hari (Syahrizal, Meiyyenti, Mitra, Ihsan, & Ramdesta, 2024).

Peran krusial nelayan tersebut tidak hanya berdampak pada skala rumah tangga, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul. Sepanjang tahun 2024, sektor perikanan tangkap mencatatkan pencapaian luar biasa dengan total hasil tangkapan menembus angka 4.058 ton (4.058.881 kg), yang didominasi oleh komoditas unggulan seperti tongkol, tuna, cakalang, layur, hingga lobster (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, 2024). Aktivitas ini menghasilkan perputaran uang yang sangat besar, yakni mencapai Rp 81,5 miliar dengan rata-rata pendapatan per nelayan mengalami peningkatan yang stabil (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, 2024). Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan ini membuktikan bahwa nelayan adalah motor penggerak utama dalam merealisasikan visi "Halaman Depan" pembangunan daerah yang dicanangkan pemerintah (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2024). Secara teoretis, visi ini beririsan dengan konsep Ekonomi Biru (*Blue Economy*). Menurut Adrianto dkk. (2022), Ekonomi Biru merupakan model pembangunan samudra yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan ekosistem serta keadilan sosial bagi masyarakat pesisir. Namun, dalam konteks Gunungkidul, fokus pembangunan tampak masih menitikberatkan pada capaian angka produksi dibandingkan jaminan kesejahteraan sosial para nelayannya.

Namun, kontribusi ekonomi yang besar ini berbanding lurus dengan risiko keselamatan yang sangat tinggi bagi para nelayan saat melaut. Samudra Hindia,

yang menjadi wilayah tangkap utama nelayan Gunungkidul, dikenal memiliki karakteristik gelombang yang ganas dan kondisi cuaca yang dinamis.

Aktivitas melaut sering kali dilakukan dengan peralatan yang sederhana dan tanpa perlindungan yang memadai, sementara kondisi cuaca yang tidak menentu dan gelombang laut yang ekstrem kerap mengancam. Profesi nelayan memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap paparan bahaya di lingkungan kerja, yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan serta kecelakaan kerja. Berbagai bentuk kecelakaan kerja yang terjadi pada nelayan di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari cedera ringan hingga yang berakibat fatal, mencakup luka ringan, luka sedadng, luka berat, terkilir, patah tulang, luka bakar, hingga menyebabkan kematian (Lubis & Susilawati, 2024).

Besarnya risiko tersebut terefleksi secara nyata dalam data statistik kecelakaan laut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2025, telah terjadi 62 kasus kecelakaan laut dengan total 107 korban. Dari keseluruhan korban tersebut, sebanyak 10 orang ditemukan meninggal dunia dan 3 orang lainnya dinyatakan hilang (Subarkah, 2025). Tingginya angka fatalitas ini mempertegas bahwa profesi nelayan di pesisir selatan merupakan pekerjaan yang beraruh nyawa di tengah minimnya sistem deteksi dini dan perlindungan teknis yang memadai di lapangan. Angka kecelakaan ini bukan sekadar data statistik, melainkan representasi dari ancaman nyata yang setiap hari menghantui para nelayan dalam upaya mereka menopang ekonomi daerah.

Kesenjangan antara kontribusi ekonomi yang masif dan perlindungan sosial bagi nelayan menciptakan sebuah ironi besar dalam tata kelola sektor kelautan di Kabupaten Gunungkidul. Meskipun sektor perikanan mampu menyumbangkan nilai penjualan yang sangat fantastis hingga mencapai Rp81,5 miliar pada tahun 2024, jaminan perlindungan bagi subjek utamanya justru masih absen dari skema anggaran daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul secara terbuka mengakui bahwa saat ini pemerintah daerah belum mampu menyediakan bantuan premi asuransi BPJS

Ketenagakerjaan bagi para nelayan karena keterbatasan alokasi dalam APBD (Priatmojo, 2024).

Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan jaring pengaman sosial ini menjadi sangat kontradiktif jika melihat perbandingan angka yang ada. Anggaran yang dibutuhkan untuk mengover iuran perlindungan bagi 2.276 nelayan di Gunungkidul hanya berkisar Rp500 juta per tahun sebuah angka yang relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan kontribusi miliaran rupiah yang dihasilkan nelayan bagi daerah setiap tahunnya. Akibatnya, para nelayan dipaksa untuk memikul risiko keselamatan secara mandiri di tengah ketidakpastian pendapatan dan ancaman cuaca ekstrem, sementara mereka tetap dituntut untuk menyukseskan visi pembangunan "Halaman Depan" yang dicanangkan oleh negara.

Di tengah vakumnya perlindungan pemerintah dan ketidakpastian alam yang kian ekstrem, para nelayan dipaksa untuk menciptakan jaring pengaman mereka sendiri. Ketika jaminan asuransi dari pemerintah tidak tersedia dan risiko kecelakaan laut terus mengancam nyawa, doa dan kepercayaan menjadi satu-satunya sandaran yang tersisa untuk menghadapi ganasnya Samudra Hindia. Kondisi ini menjadikan tradisi Sedekah Laut bukan lagi sekadar seremonial adat tahunan atau identitas budaya pesisir, melainkan sebuah mekanisme pertahanan psikologis dan "asuransi spiritual". Istilah ini merujuk pada pemikiran fungsionalisme Bronislaw Malinowski (1948), yang menjelaskan bahwa ritual sering kali digunakan masyarakat sebagai mekanisme untuk meredakan kecemasan (*anxiety relief*) saat menghadapi risiko lingkungan yang ekstrem di luar kendali teknis manusia. Dalam hal ini, ritual menjadi sandaran bagi nelayan untuk memohon keselamatan langsung kepada kekuatan alam sebagai bentuk negosiasi terhadap rasa takut yang mereka hadapi.

Ritual Sedekah Laut menggambarkan hubungan timbal balik yang mendalam antara manusia dengan laut, di mana sesaji yang dilarung menjadi simbol negosiasi simbolik atas rasa takut dan harapan nelayan (Afriansyah & Sukmayadi, 2022). Di Pantai Baron, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai

mekanisme sosial untuk menciptakan keseimbangan hubungan antara masyarakat dengan alam lingkungannya (Amanatin, Sekarningrum, & Supangkat, 2024). Bagi nelayan, ketika kehadiran negara melalui sistem perlindungan formal seperti asuransi masih belum dirasakan secara merata, doa dan ritual menjadi satu-satunya jaminan spiritual yang mampu memberikan ketenangan batin sebelum mereka menerjang ombak (Widiastuti, Mia Meilina, & Rina Sovianti, 2018).

Pelaksanaan ritual ini terbukti mampu memberikan dampak psikologis yang nyata bagi nelayan, yakni menumbuhkan rasa percaya diri serta rasa aman saat menghadapi risiko kerja yang tinggi di tengah laut (Widiastuti, Mia Meilina, & Rina Sovianti, 2018). Tradisi Sedekah Laut juga berfungsi sebagai perekat sosial yang dilandasi oleh perasaan senasib dan sepenanggungan di antara para nelayan, yang secara kolektif berupaya menjaga keberlanjutan hidup dan ekonomi mereka (Afriansyah & Sukmayadi, 2022). Dengan demikian, film dokumenter ini tidak hanya memotret sebuah upacara budaya, melainkan sebuah realitas tentang bagaimana masyarakat pesisir mengelola rasa takut dan menggantungkan keselamatan mereka pada kekuatan yang melampaui birokrasi negara.

Situasi ini menggambarkan bahwa perjuangan nelayan untuk memperoleh hak atas perlindungan dan jaminan keselamatan yang layak masih terus berlangsung, serta membutuhkan dukungan yang lebih nyata dari pihak pemerintah melalui kebijakan yang inklusif. Fenomena ketiadaan jaminan formal di tengah risiko nyawa yang ekstrem inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis dalam memproduksi film dokumenter *"Aku Pulang"*.

Dalam kajian komunikasi, film dokumenter dipandang sebagai medium alternatif yang memiliki kekuatan untuk menyuarakan isu-isu sosial yang sering kali terpinggirkan dari narasi media arus utama. Sejalan dengan pemikiran Bill Nichols yang menyatakan dokumenter sebagai upaya memberikan argumen tentang dunia nyata, serta penelitian Iwan Jati (2021) yang menekankan dokumenter sebagai instrumen advokasi, medium ini mampu membedah

ketimpangan kebijakan serta memberikan ruang bagi suara-suara yang selama ini diabaikan oleh struktur kekuasaan. Hal ini menjadikan pemilihan dokumenter dalam film "*Aku Pulang*" sebagai langkah strategis untuk mempertemukan realitas pahit kehidupan nelayan dengan kesadaran publik yang lebih luas (Jati, 2021).

Dalam perancangan film dokumenter ini, penulis mengacu pada konsep Kepemimpinan Artistik (*Artistic Leadership*) yang digagas oleh Michael Rabiger (2015). Rabiger menegaskan bahwa dokumenter bukan sekadar aktivitas merekam realitas fisik secara pasif, melainkan sebuah upaya aktif sutradara untuk menemukan dan menyusun "kebenaran emosional" (*emotional truth*). Pendekatan ini menjadi landasan krusial dalam film "*Aku Pulang*" untuk menyingkap realitas kehidupan nelayan yang sering kali tersembunyi di balik data statistik: yakni adanya pertarungan nyawa manusia di tengah minimnya jaminan keselamatan kerja."

Dalam proses perancangannya, penulis menyadari bahwa kompleksitas masalah nelayan tidak dapat direkam melalui satu cara pandang tunggal, sehingga penulis menerapkan Strategi Penyutradaraan Hibrida (*Hybrid Directing Strategy*). Strategi ini secara dinamis memadukan Mode Observasional sebagai fondasi untuk merekam otentisitas bahaya laut, Mode Performatif melalui *directed action* guna memvisualisasikan trauma psikologis keluarga korban, serta Elemen Ekspositori berupa data grafis untuk mengubah narasi personal menjadi kritik kebijakan yang tajam. Melalui pendekatan ini, film "*Aku Pulang*" hadir sebagai sebuah pernyataan sikap (*statement*) yang menegaskan bahwa nelayan tradisional bukan sekadar statistik ekonomi, melainkan nyawa manusia yang bertaruh tanpa jaminan perlindungan. Karya ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan empati sosial sekaligus menjadi media advokasi yang mendesak pemangku kebijakan untuk menutup celah ketimpangan antara besarnya kontribusi ekonomi nelayan dengan minimnya jaminan keselamatan yang mereka terima.

1.2 Manfaat penciptaan karya

1.2.1 Manfaat karya secara akademis

1. Memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan studi Ilmu Komunikasi dan Penyiaran, khususnya dalam penerapan Pendekatan Hibrida (*Hybrid Approach*) pada produksi film dokumenter yang memadukan kekuatan mode Observasional, Performatif, dan Ekspositori secara dinamis.
2. Memberikan referensi akademis bagi peneliti atau mahasiswa selanjutnya yang ingin mengeksplorasi strategi penyutradaraan dalam membingkai isu sosial dan kearifan lokal melalui media audio-visual.
3. Menjadi bahan kajian mengenai pemanfaatan film dokumenter sebagai instrumen komunikasi advokasi dalam membedah ketimpangan kebijakan publik dan perlindungan sosial di sektor kelautan.

1.2.2 Manfaat karya secara praktis

1. Menjadi media kritik konstruktif dan masukan visual bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengenai urgensi penyediaan jaring pengaman sosial dan asuransi keselamatan bagi nelayan tradisional yang terbukti menjadi penyokong ekonomi daerah.
2. Sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori komunikasi, sinematografi, dan manajemen produksi film dokumenter yang telah dipelajari selama masa perkuliahan di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta.
3. Sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori komunikasi, sinematografi, dan manajemen produksi film dokumenter yang telah dipelajari selama masa perkuliahan di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta.